

Polri dan Kepolisian Jepang Saudara dalam Rangka Reformasi

TEKAD PENGABDIAN POLISI ALUMNI JICA
Kami Polisi Alumni JICA Bertekad untuk Terus
Menumbuh-Kembangkan Terwujudnya Polri yang
Profesional, Bermoral dan Modern dalam
Masyarakat yang Demokratis melalui Ikatan
Sakura Indonesia (ISI)
Jakarta, 10 Agustus 2007

Oleh : Takeuchi Naoto



Takeuchi Naoto

Ini adalah deklarasi ISI (Ikatan Sakura Indonesia) sebagai alumni JICA, yaitu kelompok Perwira Polri yang pernah meneliti dan belajar di Jepang mengenai Sistem Kepolisian di Jepang dalam rangka "Program Bantuan Reformasi Polri" oleh Pemerintah Jepang. Sejak

Februari 2002, sebanyak 142 Perwira (terbagi dalam 7 angkatan) telah diberangkatkan ke Jepang dalam rangka mengikuti kegiatan "Studi Banding"; serta sebanyak 72 Perwira Polri juga telah diberangkatkan ke Jepang dalam rangka kegiatan "counterpart training". Deklarasi diatas diucapkan dihadapan Derenbang Kapolri, Irjen Pol. Drs. Tjuk Sugiarto, MBA, yang memimpin Pokja (Working Group) yang dibentuk sebagai wadah koordinasi dan perundingan isu-isu terkait pelaksanaan Program antara kedua belah pihak Polri dan Kepolisian Jepang. Hingga saat ini, secara rutin Pokja telah melaksanakan sebanyak 54 kali, dimana dilakukan perundingan isi proposal kerja sama, pembahasan tantangan dan solusi, laporan kondisi perkembangan Proyek, laporan pasca-kepulungan peserta training, dll. Kelahiran ISI dalam Pokja pada saat itu adalah lambang kerja sama yang berharga khusus dan silaturahmi antara saudara organisasi kepolisian di Asia.

Pemerintah Jepang telah memulai bantuan reformasi Polri sejak 6 tahun yang lalu, hal itu berdasarkan permintaan untuk bantuan bagi usaha reformasi Polri, setelah berpisahannya Polri dari ABRI, maka sejak Februari 2001 pemerintah Jepang JICA

dan *National Police Agency of Japan* (NPA: Badan Kepolisian Nasional Jepang) mengirimkan Penasehat Ahli Kapolri sebagai tenaga ahli dari NPA yang diperbantukan untuk jangka panjang, yang pertama Mr. YAMAZAKI Hiroto (Feb. 2001-Ags. 2005), kemudian Mr. UEMATSU Shinichi (Jul. 2005-Ags. 2007) dan selanjutnya saya sendiri (Jul. 2007). Hingga kini telah ditempatkan sejumlah 17 tenaga ahli jangka panjang dari Kepolisian Jepang, selain itu lebih dari 30 tenaga ahli jangka pendek telah diperbantukan secara teratur atau ad hoc, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Polri.

TAHAPAN BANTUAN KEPOLISIAN JEPANG

Feb. 2000	Kapolri (waktu itu) Jend. Pol. Drs. Rusdiharjo mengajukan permintaan bantuan bagi usaha reformasi Polri kepada Dubes Jepang Kawakami.
Nov. 2000	Menkopolkam RI, Yang Mulia Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kunjungannya ke Jepang mengajukan permintaan bantuan bagi usaha Reformasi Polri.
Feb. 2001	JICA (<i>Japan International Cooperation Agency</i>) mengirimkan tenaga ahli sebagai penasehat Kapolri, Mr. Yamazaki.
14-16 Juli 2002	Kepala NPA, Mr. TANAKA berkunjung ke Indonesia untuk berdiskusi dengan Kapolri, Jendral Dai Bachtiar.
1 Agust. 2002	Proyek Bekasi (Proyek Peningkatan Aktivitas Polisi Sipil) dimulai.
1 Agust. 2007	Dimulainya Proyek Bekasi (Tahap 2)

Polri dan Kepolisian Jepang Saudara dalam Rangka Reformasi

TEKAD PENGABDIAN POLISI ALUMNI JICA
Kami Polisi Alumni JICA Bertekad untuk Terus
Menumbuh-Kembangkan Terwujudnya Polri yang
Profesional, Bermoral dan Modern dalam
Masyarakat yang Demokratis melalui Ikatan
Sakura Indonesia (I S I)
Jakarta, 10 Agustus 2007

Oleh : Takeuchi Naoto



Takeuchi Naoto

Ini adalah deklarasi ISI (Ikatan Sakura Indonesia) sebagai alumni JICA, yaitu kelompok Perwira Polri yang pernah meneliti dan belajar di Jepang mengenai Sistem Kepolisian di Jepang dalam rangka "Program Bantuan Reformasi Polri" oleh Pemerintah Jepang. Sejak

Februari 2002, sebanyak 142 Perwira (terbagi dalam 7 angkatan) telah diberangkatkan ke Jepang dalam rangka mengikuti kegiatan "Studi Banding"; serta sebanyak 72 Perwira Polri juga telah diberangkatkan ke Jepang dalam rangka kegiatan "counterpart training". Deklarasi diatas diucapkan dihadapan Derenbang Kapolri, Irjen Pol. Drs. Tjuk Sugiarto, MBA, yang memimpin Pokja (Working Group) yang dibentuk sebagai wadah koordinasi dan perundingan isu-isu terkait pelaksanaan Program antara kedua belah pihak Polri dan Kepolisian Jepang. Hingga saat ini, secara rutin Pokja telah melaksanakan sebanyak 54 kali, dimana dilakukan perundingan isi proposal kerja sama, pembahasan tantangan dan solusi, laporan kondisi perkembangan Proyek, laporan pasca-kepulungan peserta training, dll. Kelahiran ISI dalam Pokja pada saat itu adalah lambang kerja sama yang berharga khusus dan silaturahmi antara saudara organisasi kepolisian di Asia.

Pemerintah Jepang telah memulai bantuan reformasi Polri sejak 6 tahun yang lalu, hal itu berdasarkan permintaan untuk bantuan bagi usaha reformasi Polri, setelah berpisahannya Polri dari ABRI, maka sejak Februari 2001 pemerintah Jepang JICA

dan *National Police Agency of Japan* (NPA: Badan Kepolisian Nasional Jepang) mengirimkan Penasehat Ahli Kapolri sebagai tenaga ahli dari NPA yang diperbantukan untuk jangka panjang, yang pertama Mr. YAMAZAKI Hiroto (Feb. 2001-Ags. 2005), kemudian Mr. UEMATSU Shinichi (Jul. 2005-Ags. 2007) dan selanjutnya saya sendiri (Jul. 2007). Hingga kini telah ditempatkan sejumlah 17 tenaga ahli jangka panjang dari Kepolisian Jepang, selain itu lebih dari 30 tenaga ahli jangka pendek telah diperbantukan secara teratur atau ad hoc, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Polri.

TAHAPAN BANTUAN KEPOLISIAN JEPANG

Feb. 2000	Kapolri (waktu itu) Jend. Pol. Drs. Rusdiharjo mengajukan permintaan bantuan bagi usaha reformasi Polri kepada Dubes Jepang Kawakami.
Nov. 2000	Menkopolkam RI, Yang Mulia Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kunjungannya ke Jepang mengajukan permintaan bantuan bagi usaha Reformasi Polri.
Feb. 2001	JICA (<i>Japan International Cooperation Agency</i>) mengirimkan tenaga ahli sebagai penasehat Kapolri, Mr. Yamazaki.
14-16 Juli 2002	Kepala NPA, Mr. TANAKA berkunjung ke Indonesia untuk berdiskusi dengan Kapolri, Jendral Dai Bachtiar.
1 Agust. 2002	Proyek Bekasi (Proyek Peningkatan Aktivitas Polisi Sipil) dimulai.
1 Agust. 2007	Dimulainya Proyek Bekasi (Tahap 2)

II. **"Bagian Sosialisasi**, terbentuk mekanisme untuk menyebarluaskan aktivitas polisi sipil ke wilayah masing-masing yang majemuk, dan pengalaman dan pengetahuan yang terbukti dalam "bagian model" akan diseminasi ke seluruh Indonesia melalui pelatihan. Tentu saja, kegiatan di Bekasi dan Bali adalah salah satu contoh, maka dalam proses diseminasi mungkin ada modifikasi kalau perlu, karena situasi Polisi di setiap wilayah berbeda satu dengan yang lain. Untuk mencapai tujuan ini, pelatihan di Jepang dan pelatihan di Negara ketiga akan dilakukan secara strategis, dikombinasikan dengan pelatihan di Indonesia, yaitu di Bekasi. Sekaligus, tenaga ahli dalam bidang Polmas di PTIK dan saya sendiri akan memperkenalkan pengalaman dan hasil kegiatan di Bekasi dan Bali kepada siswa-siswi sekolah-sekolah Polri.

Prinsip atau tujuan dasar dari Proyek Bekasi adalah "Polisi memperoleh kepercayaan dari Masyarakat dengan memenuhi harapan mereka". Yang diharapkan oleh masyarakat adalah ketika ada tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, gangguan dan kesusahan, Polisi dapat beraksi dengan TULUS dan CEPAT. Dengan kata lain, melayani secara tulus terhadap permintaan bantuan/pengaduan, dan bereaksi secara cepat merespon laporan tersebut. **Jadi, kepercayaan masyarakat adalah ketulusan plus kecepatan.**

Menurut saya, pokok-pokok kegiatan BKPM ("Koban" ala Indonesia) termasuk: penjagaan,

Pekayon yang seluruh petugasnya Polwan. Di samping itu, telah terbentuk 4 Pos Polmas di desa ("Chuzaiشو" ala Indonesia) yang mempunyai struktur kantor dan rumah tangga untuk petugas dalam satu fasilitas.

Proyek Bali: Proyek Peningkatan Aktivitas Polisi Pariwisata di Polda Bali

Berdasarkan permohonan Polri, pada Oktober 2003 Pemerintah Jepang mengirimkan perwira tinggi (purnawirawan) sebagai penasehat Kapolda Bali, dan pada bulan Juli 2005 dibentuknya "Proyek Peningkatan Aktivitas Polisi Pariwisata di Polda Bali". Proyek Bali ini juga sudah masuk ke tahap ke-2 sejak bulan Juli 2007 selama 5 tahun.

Sistem "Koban/Chuzaiشو" di Kepolisian Jepang secara garis besar.

Pada Zaman Meiji (1868-1912), Jepang membangun negaranya agar modern secara cepat. Dalam proses ini, Jepang menggunakan sistem kepolisian modern. Markas Besar Kepolisian Metropolitan Tokyo yang didirikan pada 1874, menggunakan sistem awal pos polisi non residensi (Koban). Rinciannya, Pada tahun 1874, Mabes Kepolisian Metropolitan mendirikan "Koban-sho" sebagai unit subordinat dari kantor polisi (police station). Pada akhir tahun 1880 ada sejumlah 349 "Koban-sho" di wilayah Metropolitan Tokyo. Setelah itu, sistem ini digunakan juga oleh prefektur-prefektur (yang setara dengan provinsi di Indonesia), dan pemerintahan prefektur (kecuali Tokyo) juga mendirikan pos polisi residensi (Chuzaiشو). Pada tahun 1888, Dept Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan dasar bahwa pada umumnya "Chuzaiشو" harus diutamakan di seluruh pelosok Jepang, dan akibatnya, wilayah yuridis kantor polisi dalam prefektur dibagi menjadi sejumlah distrik, dan pada tiap distrik itu ditugaskan seorang petugas polisi. Pada tahun 1892 sejumlah 11.507 buah Chuzaiشو/Koban dibentuk di seluruh Jepang.

Sekarang, ada 6185 buah "Koban" dan 7123 buah "Chuzaiشو" bawah sekitar 1200 Police Station di seluruh Jepang (47 Prefektur). Menurut Pasal 15 dan 16, Peraturan Operasi *Community Police* (NPSC=*National Public Safety Commission*), pada dasarnya, "Koban" dibentuk di wilayah perkotaan dan tiap "Koban" dioperasikan oleh sebuah grup yang terdiri dari tiga orang *community police* atau lebih dalam tiap shift. Pada dasarnya, "Chuzaiشو" dibentuk di wilayah pedesaan dan tiap "Chuzaiشو" dioperasikan oleh satu petugas *community police* yang bertempat tinggal di sana.

Masyarakat lebih sering mengunjungi "Koban" dan "Chuzaiشو" dibandingkan fasilitas-fasilitas



pelayanan, patroli, kunjungan, tindakan pertama di TKP, dan kerjasama dengan FKPM, 14 BKPM di Bekasi (fasilitasnya dihibahkan dari Pemerintah Jepang) sudah ditetapkan sebagai organisasi yang resmi dari sudut Ortala oleh Keputusan Kapolri pada tanggal 10 Agustus. Dijelaskan dalam keputusan tersebut, definisi BKPM bukan "balai" untuk FKPM, melainkan BKPM yang berada di Bekasi, yaitu Pos dengan fasilitas seperti ruang rapat untuk FKPM, Di Bekasi, Pospol (atau "Polpos" secara resmi menurut Keputusan tersebut) sudah mulai menjalankan kegiatan yang sama dengan BKPM, misalnya di Polpos



Peningkatan Aktivitas Polisi Pariwisata di Polda Bali

penegak hukum lainnya dan merasa lebih nyaman dengan keberadaan pos ini. Hal ini karena petugas "Koban" selalu ada di jalan (menjaga keamanan siang dan malam sepanjang tahun), sehingga penduduk setempat merasa bebas berkonsultasi dengan mereka. Petugas polisi telah dilatih berhubungan dengan masyarakat, karenanya mereka menanggapi permintaan masyarakat dengan penuh perhatian dan pertimbangan.

Melalui pengawasan jalan, patroli lingkungan dan kunjungan ke rumah-rumah penduduk, petugas *community police* berhubungan langsung dengan penduduk. Situasi distribusi petugas polisi di dalam bidang-bidang kepolisian adalah: sekitar 36% petugas kepolisian bekerja untuk bidang *community police*. Demikian, kehidupan lingkungan masyarakat Jepang yang aman dan tenang dijaga oleh sistem "Koban" yang beroperasi sangat efisien dan dilakukan dengan jumlah petugas polisi yang relatif sedikit.

Petugas *community police* berdinan dengan mematuhi Jadwal Kegiatan Standar yang berisi ketentuan jam untuk melaksanakan patroli, kunjungan, berjaga di pos, dan sebagainya: misalnya Jam 8-9 untuk Jaga, Jam 9-10 untuk Patroli, dll dalam kondisi yang memenuhi waktu kerja standar (8 jam istirahat per 24 jam shift).

Ciri-ciri sistem ini adalah:

1) Jadwal yang sesuai dengan situasi wilayahnya, 2) Bisa berubah tergantung situasi hari tersebut, 3) Seimbang antara pengawasan dan "kepositifan" oleh petugas (kalau mau mengubah, dapat izin atasan sebelumnya atau laporkan setelahnya).

Biasanya, koban dijaga oleh paling sedikit tiga petugas *community police* yang bertugas secara bergantian, yaitu sistem 3 shift dalam 3 hari atau sistem shift siang: Hari 1 dinas sehari penuh (24 jam), Hari 2 lepas dinas (setelah hari tugas) dan Hari 3 dinas (siang hari) atau libur secara bergiliran. Sekaligus, pada

umumnya, seorang petugas *community police* ditugaskan ke "Chuzai-sho" dan melaksanakan sistem shift siang: yaitu 8 jam kerja per hari selama 5 hari kerja per minggu.

Jenis aktivitas petugas *Community Police* termasuk: (1) Berjaga, (2) Patroli, (3) Kunjungan Rutin ke Rumah dan Tempat Kerja, (4) Dinas di dalam kantor (misalnya, memberi petunjuk jalan pada pejalan kaki, menerbitkan pamflet informasi dan memberi layanan masing-masing kepada penduduk) dan (5) Dinas khusus termasuk kegiatan kerjasama dengan Forum Komunikasi Koban dan masyarakat umum. Berjaga di "Koban" dan "Chuzai-sho" dilakukan dengan berdiri mengawasi di depan atau duduk mengawasi dari dalam. Hal ini memungkinkan petugas polisi menanggapi kejadian apapun dengan cepat. Saat berpatroli, (berjalan kaki, memakai sepeda atau mobil), mereka secara bersamaan memperoleh pengetahuan topografi dan area. Sambil berpatroli,



Salah satu Pos Koban /Chuzisho di Jepang

petugas *Community Police* menanyai orang-orang yang terlihat mencurigakan, memeriksa tempat yang rawan kecelakaan dan memberikan bimbingan pencegahan kejahatan pada keluarga di daerah yang cenderung timbul kejahatan. Pada tahun 2005, petugas *community police* menangkap sekitar 326.700 orang tersangka, angka ini mencapai 84,4% dari keseluruhan jumlah orang yang ditangkap di bawah Hukum Pidana. Sekaligus, mereka memberikan pengarahan dan pengaturan lalu lintas, menolong orang yang luka, memperingati masyarakat akan kemungkinan timbulnya bahaya, menjaga anak yang tersesat dan orang mabuk. Di samping itu, petugas *community police* yang ditugaskan di *koban* dan *chuzaisho* secara berkala melakukan kunjungan rutin ke rumah-rumah masyarakat dan kantor-kantor yang ada di wilayah mereka. Selama kunjungan ini, mereka memberikan anjuran pencegahan timbulnya kejahatan dan kecelakaan, mendengarkan pendapat penduduk dan menerima saran untuk perbaikan pelayanan polisi. Mereka juga menanyakan susunan

termasuk *Community Policing* perlu pelatihan praktek. Di Jepang, pelatihan dititikberatkan pada kegiatan di lapangan (*Patroli, Kunjungan*), juga ada budaya kerja yang senior mengajar kiat-kiat untuk kegiatan nyata kepada junior.

(2) Filosofi Pemimpin Pol. Jepang

Pemimpin tidak bisa melaksanakan kegiatan riil sendiri, yang terpenting adalah memberikan kepercayaan dan membiarkan anak buah, serta menjunjung tinggi/menghargai anggota di dalam hati (kadang-kadang juga bergaul secara ramah). Di samping itu, melaksanakan *Diklat* supaya anggota bisa bekerja tanpa diperintah, sering diawasi. Membiarkan anggotanya bekerja dengan baik, sehingga fungsi *Pamen (Ka-Koban)* sangat penting.

(3) Konsensus sebagai Sistem Manajemen Jepang

Untuk menciptakan 'kesadaran kebersamaan' antara masing-masing seksi dan departemen, sebelum keputusan atau rencana diambil, semua seksi dan departemen yang terkait sudah dikonsultasikan dan menandatangani dokumen. Sistem ini disebut "*Nemawasi*" (konsultasi) dan "*Ringi*" (tanda tangan). Cara ini membutuhkan waktu lama, tetapi implementasinya lebih lancar karena sudah ada 'keterlibatan' seluruh anggota di seksi tersebut, termasuk junior pun turut bertanggung jawab.

Demikianlah sistem "*Koban*" dan "*Chuzaisho*" dan butir-butir khusus kepolisian Jepang. Kami tenaga ahli dari Kepolisian Jepang merasa senang dan bangga, karena terlibat pada kerjasama dengan Kepolisian Indonesia. Kami sejak awal Program, sudah bersahabat dengan banyak pejabat-pejabat

dan petugas-petugas Polri seperti anggota *ISI (Ikatan Sakura Indonesia)* dan sebagainya.

Untuk hubungan kami dengan Polri adalah harta yang paling berharga. Saya harap dari lubuk hati terdalam, bahwa kerja sama antara kami dan saudara-saudari sekalian Polri akan berhasil sukses yang paling brilian dimasa depan. Pengalaman dan pelaksanaan di Bekasi dan Bali diharapkan dapat dimanfaatkan dalam semua kegiatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keuntungan masyarakat. Hal tersebut merupakan kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi kami.***



Polisi Jepang berpatroli di lingkungan pemukiman penduduk.

keluarga dan cara menghubungi keluarga tersebut dalam keadaan darurat.

Selanjutnya, selain sistem "*Koban*" dan "*Chuzaisho*", akan menjelaskan poin-poin khusus di Polisi Jepang.

(1) Menitikberatkan pelatihan di Lapangan (*Patroli, Kunjungan*)

Jika hanya ada buku-buku tentang teori saja, apakah anggota sudah bisa melaksanakan kegiatan? Tentu saja tidak. Seperti, kegiatan lalu lintas, *Brimob*, *interogasi*, semua teknis kegiatan polisi di lapangan